

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia yang semakin pesat kini mengarah kepada konvergensi teknologi dan berdampak pada perubahan paradigma masyarakat (Budhijanto, 2010:264). Adanya perkembangan teknologi di bidang teknologi informasi memicu perubahan besar dalam teknologi digitalisasi di mana semua konten media baik cetak maupun elektronik dapat digabungkan dan didistribusikan (Tamburaka, 2013:72). Teknologi adalah pengembangan dan pengaplikasian yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Sehingga, biasanya teknologi disebut dengan penemuan-penemuan baru yang bersifat membantu. Informasi adalah hasil pemrosesan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Sedangkan Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sudah canggih ini menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat yang ada di dunia salah satunya di negara Indonesia yang juga terkena pengaruh teknologi informasi di era globalisasi ini.

Di masa kini penggunaan internet merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut yang menyebabkan pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi sangat cepat beredar luas (Yuniani et al., 2019).

Dengan keberadaan internet inilah sebagai media online mampu dengan mudahnya menyebarkan informasi yang belum terverifikasi hanya dalam hitungan detik bisa langsung diakses oleh masyarakat melalui media sosial. Meskipun begitu, hal ini juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, salah satu dampak

negatif yang saat ini sedang ramai di masyarakat adalah informasi yang disebarakan dengan sengaja yang merupakan informasi palsu, berita bohong atau fakta yang direkayasa untuk tujuan tertentu yang saat ini masyarakat sering menyebutnya sebagai hoaks.

Kegiatan pembangunan manapun juga hanya mampu berlangsung dan mencapai sasaran apabila didasarkan pada informasi yang memadai. Informasi memang diperoleh melalui kegiatan komunikasi. Namun, sesungguhnya yang menentukan nilai komunikasi ialah informasi yang dibawa itu sendiri (Amar, 2018). Informasi bohong merupakan bentuk kejahatan yang menarik untuk dikaji karena merupakan perpaduan dari kecanggihan teknologi informasi, kejahatan siber dan juga hukum. Berita bohong mampu menimbulkan permusuhan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi (Widyarningsih & Kuntarto, 2020). Beredarnya informasi palsu atau berita bohong ini menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat dan telah dianggap sebagai informasi atau berita yang benar akibat masifnya berita bohong itu sendiri. Sementara, juga tidak adanya edukasi khusus yang dimiliki masyarakat untuk membedakan mana informasi yang benar atau yang salah.

Jumlah pengguna internet Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun, Menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) hingga kuartal II tahun 2020, jumlah pengguna internet Indonesia ada 196,7 juta atau 73,7% dari total populasi Indonesia 266,9 juta berdasarkan data BPS. Berbasis data dari riset Global Digital Report pada tahun 2020, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 160 juta pengguna atau sebanyak 59% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini meningkat sebanyak 12 juta pengguna atau berkisar di angka 8,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan durasi waktu yang dipergunakan untuk mengakses media sosial adalah sebanyak 3 jam 26 menit per hari. Sebagaimana angka pengguna internet, angka

pengguna media sosial di Indonesia juga melampaui rata-rata global durasi akses media sosial yang tercatat pada waktu 2 jam 24 menit per hari (Hidayat, 2020).

Rata-rata penduduk Indonesia memiliki 10 akun media sosial per orang, angka ini termasuk akun media sosial yang aktif maupun yang tidak aktif digunakan (Makhshun & Khalilurrahman, 2018). Meskipun tanggung jawab atas fenomena informasi bohong/hoaks tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Namun, pemerintah memiliki beberapa hal termasuk sumber daya untuk melakukan pencegahan maupun tindakan penanggulangan atas berita bohong dan termasuk dengan dampak yang ditimbulkan (Putra & Surata, 2020).

Dalam hal ini yang dianggap penting diantaranya adalah upaya mengedukasi masyarakat supaya mampu memanfaatkan media sosial secara sehat dan penuh tanggung jawab. Menghadapi penyebaran informasi bohong, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bergerak menertibkan situs dan akun media sosial yang beresiko menyebarkan informasi-informasi bohong, dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik". Ancaman pidana dari pasal tersebut disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016 yaitu hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak RP. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) (Baqi & Wahyuningsih, 2020). Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo DIY diapresiasi oleh pemerintah pusat. Namun, Daerah Istimew Yogyakarta hingga saat ini ternyata juga tidak luput dari informasi bohong.

Pada tahun 2022 di Kota Yogyakarta, Beredar postingan di media sosial dan pesan berantai, isi pesan tersebut adalah terjadi aksi begal yang mengakibatkan

seorang laki-laki yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online 'S' yang mengantar makanan. Bahwa yang bersangkutan menjadi korban kejahatan jalanan atau yang lagi trending saat ini disebut klitih walaupun klitih itu salah kaprah. Informasi tersebut menggegerkan dan meresahkan masyarakat setempat. Namun, telah dikonfirmasi oleh Dirreskrim Polda DIY bahwa informasi tersebut tidak benar (hoaks) (detikJateng, Sabtu (16/4/2022).

Belum lama ini kembali terjadi keributan di masyarakat karena adanya informasi bohong yang kembali tersebar di Kota Yogyakarta melalui media whatsapp. Informasi tersebut mengenai Upaya Penculikan Anak di Yogyakarta. Namun, sudah ditelusur, informasi tersebut ternyata tidak benar alias hoaks. Kapolsek Wonosari, Kompol Edi Purnomo mengatakan, pihaknya sudah melakukan penelusuran terkait informasi yang beredar di masyarakat itu menegaskan bahwa foto tersebut adalah anak yang tersesat dan sempat diselamatkan oleh polisi. Polisi juga merekam video anak tersebut telah kembali pulang ke rumahnya (Widodo 2023).

Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan untuk mendukung fungsinya dalam organisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku yang dilakukan dalam kelompok baik kecil maupun besar.

Sesuai dengan fungsi Dinas Kominfo sebagai pinata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik maka diharapkan segala bentuk informasi yang tersebar kepada masyarakat baik informasi nyata ataupun informasi bohong dapat terkelola sehingga bisa terfilter sebelum menjadi konsumsi masyarakat. Saat ini informasi bohong telah menjadi ancaman bagi Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan timbulnya keraguan publik karena semakin maraknya informasi-informasi dari berita hoaks yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, hal tersebut menyebabkan masyarakat juga berharap untuk mendapatkan informasi yang

memuaskan dan berkualitas . Sehingga, di lain pihak pemberi layanan juga harus memberikan layanan yang memiliki standar yang berkualitas (Amali, 2016).

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas yang memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, salah satu tugas yang dijalankan adalah sebagai pengelola produksi informasi dan publikasi pada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran sebagai media yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang benar dan sesuai. Dalam hal ini telah ditetapkan bahwa fungsi dari Dinas Kominfo adalah sebagai perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informasi di Provinsi Yogyakarta.

Pemerintah pada tingkat Provinsi Yogyakarta memberikan kewenangan kepada Dinas Kominfo Yogyakarta untuk mencegah maraknya informasi bohong karena pada dasarnya ini merupakan peran yang sangat dibutuhkan. Menurut Riyadi (2002) peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh pihak tertentu dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut individu diharapkan berperilaku sesuai dengan harapan lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma, harapan, tanggung jawab, dan lainnya) (Lantaeda et al., 2017). Untuk itu, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Yogyakarta dalam melakukan upaya preventif terhadap informasi-Info bohong yang tersebar pada masyarakat sangat diharapkan.

Media online yang berkembang membuat informasi atau berita yang disebar tidak dapat dibendung dan semakin mudah didapat tanpa bisa difilter mana yang merupakan berita yang bersifat benar dan mana berita yang bersifat bohong atau hoaks. Meskipun pada dasarnya pengguna media online tidak dapat diatur dalam tata cara penggunaannya, namun mereka memiliki kuasa penuh atas apa yang mereka konsumsi, mereka akan focus pada apa yang mereka butuhkan tanpa

perlu permisi atau bahkan jauh-jauh datang ke daerah atau negara untuk mendapatkan berita yang mereka inginkan.

Pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial seperti Google atau Mozilla Firefox dan lain sebagainya namun yang paling populer di kalangan pengguna media sosial yaitu Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Youtube, Tik-Tok dan masih banyak lainnya. Pengguna situs media sosial menyebar di seluruh kalangan yaitu meliputi kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga kalangan ekonomi atas sampai kalangan ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya yang dapat mengakses situs media sosial untuk kebutuhan masing-masing.

Hoaks atau berita bohong banyak beredar di media sosial. Data yang disampaikan oleh Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia (RI), menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian diindikasikan berasal dari 800 ribu situs di Indonesia (Amirullah, 2017). Salah satu hoaks yang juga banyak beredar melalui media sosial adalah hoaks bidang kesehatan Menurut survei yang dilakukan oleh seorang dokter bernama Ari Fahrial Syam, sebanyak 90 % lebih informasi tentang kesehatan memiliki sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan (Widiarini & Permatasari, 2017). Namun demikian, berita tersebut menyebar dengan bebas melalui situs jejaring sosial maupun pengiriman pesan instan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang menyebutkan bahwa hoaks terbanyak adalah informasi mengenai kesehatan. Hoaks tersebut disebar oleh orang-orang tanpa sengaja. Mereka menganggap informasi tersebut harus segera disampaikan karena berguna bagi orang lain Ramadhan, (2017). Kondisi ini menjadi salah satu alasan cepatnya penyebaran hoaks melalui media sosial.

Hoaks bidang kesehatan memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Penyebarannya kerap dibarengi dengan ujaran kebencian yang tidak terkendali.

Berbagai cara telah dilakukan untuk membatasi penyebaran hoaks. Perusahaan Facebook dan Google yang sangat berperan dalam diseminasi informasi lewat internet berkomitmen untuk turut aktif dalam memberantas hoaks. Aksi melawan hoaks di Indonesia juga berlangsung intens. Pemerintah melalui Kominfo sudah melakukan pemblokiran terhadap 6000 situs yang terindikasi sebagai penyebar hoaks (Ronald, 2017.). Komunitas-komunitas online melalui media sosial, seperti Turn Back Hoaks, Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoaks, Indonesia Hoaks, dan Sekoci, juga telah terbentuk. Tujuan dibentuknya komunitas-komunitas antihoaks ini adalah memerangi penyebaran hoaks di media sosial. Komunitas-komunitas online ini memiliki situs web dan melengkapinya dengan aplikasi pendeteksi hoaks. Aplikasi ini digunakan para pengguna internet untuk mengetahui hoaks dan melaporkannya.



Gambar 1.1

Gambar Informasi Hoaks obat batuk anak

Sumber: *Sosial Media Instagram Kominfo DIY, 2022*

Secara sosiologis, berita adalah semua hal yang terjadi di dunia. Dalam gambaran yang sederhana, seperti dilukiskan dengan baik oleh para pakar jurnalistik,

berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta-fakta, tetapi tidak semua fakta itu berita. Berita biasanya menyangkut orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Berita merupakan sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan. Berita sebagai informasi baru tentang kejadian yang baru, penting, signifikan yang berpengaruh pada para pendengarnya serta relevan dan layak untuk dinikmati oleh masyarakat serta bisa harus berupa fakta, objektif, berimbang dan akurat.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan kurangnya penyaringan informasi berita yang tersebar di media sosial online dari pihak yang berwenang semakin memudahkan para pembuat hoaks dalam melakukan aksinya. Serta kurangnya literasi dalam penggunaan medsos di kalangan masyarakat membuat penyebaran hoaks oleh pihak yang tidak bertanggung jawab semakin leluasa menyebarkan berita bohong. Kemudian jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut juga meningkatkan penyebaran hoaks. Tujuan dari pembuatan hoaks adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya. Permasalahan hoaks ini adalah masalah yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah maupun pihak yang terkait. (Pertivi, 2018).

Hoaks merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak beredar di kalangan masyarakat. Fenomena hoaks bukan lagi hal yang jarang terjadi termasuk di Indonesia khususnya di media sosial. Hoaks dapat membuat masyarakat resah karena informasi yang tidak diketahui kebenarannya, karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi juga membuat hoaks dapat beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial. (Juditha, 2018, h. 18).

Hoaks adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyimpan informasi palsu sebagai kebenaran, Hoaks mampu

mempengaruhi banyak orang (*Chen et al,2014*) Hoaks dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi hoaks. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, hoaks juga dapat menakut-nakuti orang yang menerimanya. (*Petkovic, et,al,2015*)

Penyebaran hoaks di media sosial Indonesia, mulai marak sejak media sosial populer sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa orang tidak bertanggung jawab, menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial dalam konteks negatif, yaitu menyebarkan fitnah, hasut dan hoaks. Hal ini semakin parah ketika Hoaks yang menyangkut kesehatan memang marak beredar di kalangan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa hoaks kesehatan lebih populer dikonsumsi masyarakat dan penyebarannya terbilang lebih cepat dibanding berita yang valid. Menurut Vossoughi informasi yang valid justru jarang menyentuh kepada seribu lebih orang sementara hoaks paling populer yang jumlahnya hanya satu persen dari informasi valid justru mampu menyebar ke seribu sampai seratus ribu orang *Vossoughi (2018)*.

Hoaks adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoaks mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas *Chen (2014)*. Hoaks dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi hoaks. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, hoaks juga dapat menakut-nakuti orang yang menerimanya. *Petkovic (2005)*.

Hoaks kesehatan sangat berbahaya apabila informasi yang tidak benar dipraktikkan oleh masyarakat, seperti mengonsumsi jenis obat-obat tertentu akan membahayakan jiwa manusia. Hoaks jenis ini juga dapat menciptakan keresahan serta kepanikan bagi masyarakat yang membacanya *Juditha, (2019)*. Karena itu hoaks

mengenai kesehatan perlu dilawan dengan cara peningkatkan literasi di masa Pandemi Covid-19 ini.

Dalam tiga bulan terakhir kejadian gagal ginjal akut (GGA) pada anak meningkat dan terjadi di banyak provinsi di Indonesia. Kejadian ini diduga akibat penggunaan sirup obat pada anak yang menyebabkan pemerintah, dalam hal ini Kemenkes menganjurkan untuk penghentian sementara penggunaan obat dalam bentuk sediaan sirup. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan otoritas yang bertanggung jawab dalam regulasi dan pengawasan produk farmasi juga telah bergerak melakukan pengujian terhadap produk obat. Pada tanggal 20 Oktober 2022, BPOM mengeluarkan berita yang menyatakan bahwa ada lima produk obat yang memiliki kandungan cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Rangkaian kejadian ini menimbulkan kegelisahan di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat umum.

Menerbitkan dan memberantas berita palsu dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya melalui kampanye literasi, inisiatif pengecekan fakta dan penetapan langkah-langkah hukuman untuk penyebarannya. Salah satu upaya pemerintah adalah melakukan kolaborasi preventif untuk mengurangi kemungkinan suatu peristiwa yang dapat memicu longsor berita palsu. Tujuan kolaboratif ini untuk mengurangi dampak penyebaran berita palsu (Dodda&Dubbudu2019).

Kurangnya literasi media yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat Indonesia dapat dengan mudah terpengaruh, terpancing dan percaya terhadap hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Masih banyak bagian dari masyarakat kita yang malas untuk melakukan *check, recheck* dan *crosscheck*, atau klarifikasi ketika mendapat informasi. Masyarakat kita pun masih sangat mudah terprovokasi dan percaya pada isu yang didapatkan.

Pemerintah harus mengambil peran dan tugasnya dalam menyikapi serta menghadapi fenomena ini. Upaya meningkatkan literasi media kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan merupakan hak rakyat untuk menerima program-program literasi media agar dapat menangkal hal-hal negatif dari semakin canggihnya media saat ini. Berangkat dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi fenomena penyebaran hoaks. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian yaitu: ***“STRATEGI DINAS KOMINFO DIY DALAM PENCEGAHAN HOAKS (STUDI KASUS PADA INSTAGRAM, FACEBOOK DAN TWITTER DINAS KOMINFO DIY)”***

1.2 Rumusan Masalah

Peran pemerintah sangat penting dalam dunia internet sekarang ini. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi semakin cepat juga berita atau informasi didapat oleh masyarakat. Hoaks merupakan isu yang terjadi di masyarakat salah satunya hoaks obat batuk anak sejak 20 oktober 2022, maka dari itu peran pemerintah sangat penting untuk memberikan informasi seluas dan secepat mungkin kepada masyarakat.

Banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangkal hoaks yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada yaitu dengan membuat sebuah konten sebagai cara untuk menangkal hoaks. Konten yang dibuat harus memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : **“Bagaimana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencegahan hoaks pada Instagram, facebook dan Twitter ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Semakin berkembangnya teknologi yang ada semakin mudahnya mendapatkan informasi di era digital, salah satu masalah yang sedang banyak terjadi

dikalangan masyarakat yaitu mengenai hoaks obat batuk yang menyebabkan gagal ginjal pada anak. Banyak masyarakat yang mudah percaya terhadap informasi yang beredar di masyarakat termasuk informasi mengenai suatu instansi. Maka dari itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pencegahan berita hoaks, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Kounikasi dan Informatika dalam pencegahan hoaks pada Instagram, facebook dan Twitter.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif kepada mahasiswa ilmu komunikasi dalam penelitian mengenai identifikasi peran pemerintah dalam menangkal isu hoaks di media sosial facebook, Instagram dan Twitter. sedangkan bagi penulis, penelitian ini dapat melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta

1.4.2 Secara praktis, Bagi instansi Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi dalam proses penyampaian informasi sedangkan Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana Kominfo DIY membuat konten dalam mengangkat isu hoaks.

1.5 Sistematika Bab

Untuk mempermudah pembaca melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka penulis menguraikan sistematika bab yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi.

Adapun sistematika bab penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I (pendahuluan), peneliti mendeskripsikan secara detail mengenai latar belakang penelitian yang mendasari sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian. Pada laman latar belakang juga dideskripsikan data-data yang menjadi bahan utama dalam penelitian, sehingga membentuk pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah penelitian. Selanjutnya pada BAB I peneliti juga mendeskripsikan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi perpaduan teori serta konsep yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Teori yang disajikan disini menerangkan hubungan antar beberapa konsep yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Konsep-konsep tersebut kemudian akan dijabarkan menjadi variabel-variabel penelitian. Oleh karena itu, pada bab tinjauan pustaka memuat landasan teori terdiri dari konsep pendukung, kerangka teoritis dan kerangka berfikir.

BAB III Metodologi Penelitian

Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Oleh karena itu, bab metodologi penelitian memuat pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan sampel, teknik analisis data, teknik interpretasi data, keabsahan data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian yang dikaitkan dengan temuan di lapangan dan pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab awal. Pembahasan atau diskusi mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Bagaimana keterkaitan penelitian dengan

teori yang sudah ada serta bagaimana peneliti menjelaskan hasil temuannya berdasarkan sudut pandang subjek penelitian yang disandingkan dengan sudut pandang teoritis. Oleh karena itu, bab hasil penelitian memuat, hasil analisis, pembahasan, dan diskusi.

BAB V Penutup

Berisi tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian dan diskusi. Berisi tentang saran yang dikemukakan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan diskusi. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

